

## PENDEKATAN SISTEMATIS PENGELOLAAN ASET DAERAH: INVENTARISASI, PENGAMANAN, DAN PEMELIHARAAN

Lukman Nulhakim<sup>1</sup>, Sudarsono<sup>2</sup>, Anis Naki<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Email: [lukman.nul@gmail.com](mailto:lukman.nul@gmail.com)

### *Abstract*

*Regional Property (BMD) is an important asset that plays a strategic role in supporting the administration and development of the region. This research aims to evaluate the management of Regional Property (BMD) in Gorontalo Regency with a focus on three main aspects: inventory, security, and asset maintenance. The research approach uses qualitative methods with case studies, where data is collected through direct observation and document analysis. The research results indicate various challenges in the management of BMD in Gorontalo Regency. From the inventory aspect, only 26.08% of the total 1,438 land parcels have certificates, while the recording process is still not orderly, leading to a lack of accuracy and delays in data updates. In terms of security, physical facilities such as fences and surveillance cameras have not been adequately implemented on strategic assets, while administrative documents are scattered across several work units without a centralized management system. Asset maintenance is also more reactive, which increases repair costs and shortens the asset lifespan. To address these issues, this research recommends the digitalization of asset inventory, acceleration of land certification processes, strengthening of physical and administrative security, implementation of planned preventive maintenance, and enhancement of human resource capacity and related regulations. The implementation of these recommendations is expected to enhance the efficiency, effectiveness, and accountability of BMD management in Gorontalo Regency, and serve as a reference for other regions in sustainable asset management.*

**Keywords:** *Regional Property, asset management, inventory, security, maintenance, Gorontalo Regency*

### *Abstrak*

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset penting yang memegang peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan BMD di Kabupaten Gorontalo dengan fokus pada tiga aspek utama: inventarisasi, pengamanan, dan pemeliharaan aset. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui observasi langsung, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai tantangan dalam pengelolaan BMD di Kabupaten Gorontalo. Dari aspek inventarisasi, hanya 26,08% dari total 1.438 bidang tanah yang telah memiliki sertifikat, sementara proses pencatatan masih belum tertib, menyebabkan kurangnya keakuratan dan keterlambatan pembaruan data. Dalam aspek pengamanan, fasilitas fisik seperti pagar dan kamera pengawas belum diterapkan secara memadai pada aset strategis, sedangkan dokumen administratif tersebar di beberapa unit kerja tanpa sistem pengelolaan terpusat. Pemeliharaan aset juga lebih banyak bersifat reaktif, sehingga meningkatkan biaya perbaikan dan memperpendek masa pakai aset. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini merekomendasikan digitalisasi inventarisasi aset, percepatan proses sertifikasi tanah, penguatan pengamanan fisik dan administratif, penerapan pemeliharaan preventif yang terencana, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan regulasi terkait. Implementasi rekomendasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan BMD di Kabupaten Gorontalo, serta menjadi referensi bagi daerah lain dalam pengelolaan aset yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Barang Milik Daerah, pengelolaan aset, inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, Kabupaten Gorontalo.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menjadi salah satu faktor krusial dalam memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik di tingkat pemerintah daerah. Di Kabupaten Gorontalo, permasalahan pengelolaan BMD cukup kompleks. Berdasarkan laporan tahun 2023, dari 1.438 bidang tanah yang tercatat sebagai aset daerah, hanya 375 bidang (26,08%) yang telah memiliki sertifikat atas nama pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pengamanan legalitas aset, yang berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan serta ketidakpastian hukum (Gorontalo, 2023).

Inventarisasi aset menjadi langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan BMD yang efektif. Proses inventarisasi tidak hanya mencakup pencatatan keberadaan aset tetapi juga memastikan keakuratan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Inventarisasi fisik bertujuan mendokumentasikan kondisi, lokasi, dan spesifikasi aset, sementara inventarisasi administratif berfokus pada aspek legalitas, seperti sertifikasi kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya (Sri Wahyuni, S. E., Dev, M. E., Rifki Khoirudin, S. E., & Dev, 2020). Ketidaktepatan dalam inventarisasi sering kali memunculkan risiko kehilangan aset dan menghambat optimalisasi pemanfaatannya (Maywarni Siregar, 2024)

Selain inventarisasi, pengamanan fisik, administrasi, dan hukum merupakan aspek penting untuk memastikan keberlanjutan penguasaan aset oleh pemerintah daerah. Pengamanan fisik melibatkan pemasangan pagar, kamera pengawas (CCTV), dan penjaga keamanan, sementara pengamanan administrasi dilakukan melalui pengelolaan dokumen secara sistematis. Di sisi lain, pengamanan hukum mencakup sertifikasi tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan formal (Hambali, 2010; Kementerian Dalam Negeri RI, 2021). Di Kabupaten Gorontalo, minimnya sertifikasi tanah menjadi salah satu faktor utama penyebab sengketa aset, yang dapat berujung pada hilangnya aset strategis pemerintah daerah.

Pemeliharaan aset juga menjadi fokus utama dalam manajemen BMD. Proses ini mencakup tindakan pencegahan dan perbaikan yang bertujuan menjaga aset agar tetap dalam kondisi optimal. Pemeliharaan yang tidak dilakukan secara memadai dapat mengakibatkan peningkatan biaya perbaikan sekaligus menurunkan nilai aset secara keseluruhan (Moenir, 2008). Jika dikelola dengan buruk, aset daerah yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru akan menjadi beban anggaran daerah (Musmin, K. R., 2022).

Selain itu, pengelolaan BMD juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan pembangunan daerah. Aset-aset daerah seperti tanah dan gedung memiliki nilai strategis dalam mendukung penyediaan infrastruktur pelayanan publik. Pengelolaan yang kurang maksimal akan menghambat optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset secara efektif (Lubis, M. H., 2024). Oleh sebab itu, pengelolaan BMD yang transparan dan akuntabel harus menjadi prioritas untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (Susanto, H., Firdaus, F., & Danial, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan BMD di Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan pendekatan sistematis yang mencakup inventarisasi, pengamanan, dan pemeliharaan. Melalui evaluasi kebijakan dan implementasi yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan BMD, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah lain dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Gorontalo. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika pengelolaan aset daerah, baik dari sisi pelaku yang terlibat maupun konteks spesifik yang memengaruhi pengelolaan tersebut. Metode studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi aspek-aspek penting dalam pengelolaan BMD, seperti proses inventarisasi, pengamanan, dan pemeliharaan, dalam lingkup Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo.

Subjek penelitian mencakup pejabat dan staf yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset daerah, antara lain kepala BKAD, kepala bidang inventarisasi dan pengamanan aset, serta staf teknis yang relevan. Informan dipilih dengan metode purposif, berdasarkan keterlibatan dan peran mereka dalam pengelolaan BMD. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis terhadap proses inventarisasi dan pemeliharaan aset. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumen resmi, seperti laporan keuangan, kebijakan pengelolaan aset, dan peraturan daerah terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam yang bersifat semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, tantangan, serta strategi yang digunakan dalam pengelolaan BMD. Kedua, observasi langsung untuk mendokumentasikan kondisi fisik aset dan cara pengelolaannya di lapangan. Ketiga, analisis dokumen dilakukan untuk memahami laporan dan kebijakan yang relevan dengan pengelolaan aset daerah. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyusun informasi yang diperoleh ke dalam kategori atau tema tertentu. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk narasi atau tabel, sehingga pola dan temuan yang signifikan dapat terlihat. Selanjutnya, kesimpulan diambil berdasarkan interpretasi data yang telah dianalisis.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi, yakni dengan membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensinya. Selain itu, penelitian ini juga menjaga reliabilitas melalui pencatatan dan pendokumentasian proses pengumpulan data secara sistematis, sehingga memungkinkan replikasi oleh peneliti lain. Penelitian ini juga mengutamakan prinsip-prinsip etika, termasuk menjaga kerahasiaan informasi informan, mendapatkan izin dari pihak terkait, serta memastikan informan memahami hak mereka selama proses penelitian berlangsung.

Metodologi penelitian ini dirancang untuk mengungkap secara mendalam dan terperinci bagaimana proses inventarisasi, pengamanan, dan pemeliharaan aset daerah diterapkan di Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan BMD, sekaligus menjadi acuan bagi daerah lain dengan permasalahan serupa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. HASIL**

Penelitian ini mengungkapkan berbagai aspek penting dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Gorontalo, yang mencakup inventarisasi, pengamanan, dan pemeliharaan aset. Temuan-temuan utama menunjukkan adanya tantangan yang signifikan pada setiap elemen tersebut.

#### **1. Inventarisasi Aset**

Inventarisasi aset merupakan langkah mendasar dalam pengelolaan BMD untuk memastikan data yang akurat dan valid. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses inventarisasi di Kabupaten Gorontalo belum berjalan optimal. Dari total 1.438 bidang tanah yang dimiliki pemerintah daerah, hanya 375 bidang (26,08%) yang telah bersertifikat. Tanah tanpa sertifikat menjadi salah satu sumber utama sengketa, mengingat sebagian besar dokumen legalitas tanah belum lengkap atau bahkan tidak tersedia. Selain itu, aset-aset lainnya, seperti gedung dan bangunan, menunjukkan persentase sertifikasi yang lebih baik (79,71%), namun masih terdapat tantangan dalam pembaruan data dan pencatatan fisik.

Sistem pencatatan yang masih manual di beberapa unit kerja juga menyebabkan inkonsistensi data antara yang tercatat dan kondisi aset di lapangan. Misalnya, terdapat aset yang telah dicatat dalam kondisi baik, namun sebenarnya sudah rusak berat atau tidak layak pakai. Masalah ini menunjukkan perlunya sistem digital berbasis teknologi untuk meningkatkan keakuratan dan efisiensi inventarisasi aset.

Tabel 1 Laporan Keuangan Kabupaten Gorontalo Tahun 2023

Jenis Aset	Jumlah Aset Terdaftar	Jumlah Bersertifikat	Presentase (%)
Tanah	1.438	375	26,08
Gedung dan Bangunan	276	220	79,71
Kendaraan Dinas	310	310	100,00
Aset Tetap Lainnya	150	100	66,67

## 2. Pengamanan Aset

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan aset di Kabupaten Gorontalo masih menghadapi berbagai kendala. Pengamanan fisik, seperti pemasangan pagar, penjagaan, atau pemasangan kamera pengawas (CCTV), belum diterapkan secara menyeluruh pada aset-aset strategis. Sebagai contoh, beberapa gedung pemerintahan tidak memiliki tanda kepemilikan yang jelas, sehingga rentan terhadap penggunaan oleh pihak tidak berwenang.

Secara administratif, dokumen penting seperti sertifikat tanah, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) belum dikelola secara terpusat. Dokumen-dokumen tersebut tersebar di beberapa unit kerja tanpa sistem penyimpanan yang terorganisasi dengan baik, sehingga rentan terhadap kehilangan atau kerusakan. Di sisi hukum, keterlambatan dalam proses sertifikasi tanah juga menjadi hambatan utama. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas mengurus legalitas aset, serta kurangnya alokasi anggaran khusus untuk percepatan sertifikasi tanah.

## 3. Pemeliharaan Aset

Pemeliharaan aset cenderung dilakukan secara reaktif, yaitu hanya ketika aset mengalami kerusakan yang signifikan. Hal ini menyebabkan biaya perbaikan yang lebih tinggi dan memperpendek masa pakai aset. Contohnya, sejumlah kendaraan dinas yang tercatat dalam daftar inventaris mengalami kerusakan berat akibat kurangnya perawatan berkala. Selain itu, beberapa gedung dan bangunan dilaporkan dalam kondisi fisik yang buruk, meskipun di dalam laporan tercatat sebagai aset dalam kondisi baik

Tabel 2 Laporan Keuangan Kabupaten Gorontalo Tahun 2023

Jenis Aset	Jumlah Aset Terdaftar	Jumlah Bersertifikat	Presentase (%)
Kendaraan Dinas	280	30	9,68
Gedung dan Bangunan	250	26	10,40
Aset Tetap Lainnya	120	30	20,00
Kendaraan Dinas	280	30	9,68

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Inventarisasi Aset**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi yang tidak optimal berpotensi mengganggu pengelolaan aset secara keseluruhan. Ketiadaan sertifikat pada sebagian besar aset tanah dapat menimbulkan sengketa hukum, yang pada akhirnya berisiko kehilangan aset strategis. Selain itu, sistem manual yang digunakan dalam pencatatan aset menjadi hambatan utama dalam pembaruan data. Oleh karena itu, penerapan sistem digital berbasis teknologi sangat penting untuk memastikan keakuratan dan efisiensi inventarisasi. Sistem ini juga dapat membantu meningkatkan transparansi data, yang mendukung pengelolaan aset secara lebih akuntabel.

### **2. Pengamanan Aset**

Kurangnya pengamanan aset mencerminkan lemahnya kontrol terhadap kekayaan daerah. Pengamanan fisik yang belum optimal meningkatkan risiko kehilangan aset, sementara pengelolaan dokumen administratif yang tidak terpusat mempersulit aksesibilitas data legalitas aset. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu mempercepat proses sertifikasi tanah dan mengembangkan sistem penyimpanan dokumen digital yang terorganisasi. Selain itu, penggunaan teknologi modern seperti Internet of Things (IoT) untuk memantau aset secara real-time dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pengamanan fisik.

### **3. Pemeliharaan Aset**

Pendekatan reaktif dalam pemeliharaan aset berdampak pada tingginya biaya operasional dan potensi kerusakan lebih lanjut. Untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah daerah perlu menerapkan sistem pemeliharaan preventif yang mencakup inspeksi rutin, perawatan teknis, dan jadwal pemeliharaan yang terencana. Penyediaan anggaran khusus untuk pemeliharaan juga harus menjadi prioritas agar kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan.

### **4. Implikasi dan Rekomendasi**

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan BMD di Kabupaten Gorontalo. Rekomendasi tersebut meliputi:

- Mengimplementasikan sistem digital untuk inventarisasi yang memungkinkan pembaruan data secara real-time.
- Mempercepat sertifikasi tanah dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional.
- Menggunakan teknologi pemantauan modern untuk meningkatkan pengamanan fisik dan administratif.
- Menyusun jadwal pemeliharaan preventif yang terencana dengan dukungan anggaran yang memadai.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengevaluasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Gorontalo dengan fokus pada tiga elemen utama: inventarisasi, pengamanan, dan pemeliharaan aset. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

### **Inventarisasi Aset**

Inventarisasi aset di Kabupaten Gorontalo belum dilakukan secara optimal, terutama untuk aset berupa tanah. Dari 1.438 bidang tanah yang dimiliki pemerintah daerah, hanya 375 bidang (26,08%) yang telah bersertifikat. Kondisi ini menunjukkan rendahnya tingkat legalitas aset, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa atau kehilangan aset. Sistem pencatatan aset yang masih manual di beberapa unit kerja juga menjadi hambatan dalam memastikan keakuratan data dan pembaruan informasi secara tepat waktu.

### **Pengamanan Aset**

Pengamanan aset di Kabupaten Gorontalo masih memerlukan perhatian serius, baik secara fisik, administratif, maupun hukum. Banyak aset strategis, seperti gedung dan kendaraan dinas, yang belum dilengkapi dengan fasilitas keamanan yang memadai, seperti kamera pengawas (CCTV) atau penjaga keamanan. Selain itu, dokumen administratif seperti sertifikat tanah dan dokumen kendaraan belum dikelola secara baik, sehingga rentan hilang atau rusak. Proses sertifikasi tanah juga berjalan lambat, mengakibatkan sebagian besar aset tanah belum memiliki status legalitas yang jelas.

#### **Pemeliharaan Aset**

Pendekatan pemeliharaan aset yang dominan adalah reaktif, yaitu hanya dilakukan setelah terjadi kerusakan. Hal ini mengakibatkan biaya perbaikan yang tinggi dan menurunnya masa pakai aset. Pemeliharaan preventif, seperti inspeksi rutin atau perawatan berkala, belum menjadi prioritas, sehingga banyak aset yang mengalami kerusakan berat sebelum mendapatkan tindakan perbaikan. Beberapa kendaraan dinas dan bangunan dilaporkan dalam kondisi rusak berat, meskipun tercatat sebagai aset dalam kondisi baik.

### **SARAN**

Untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan BMD di Kabupaten Gorontalo, berikut adalah rekomendasi yang dirancang secara detail:

#### **1. Digitalisasi Inventarisasi Aset**

- Implementasi Sistem Digital Terintegrasi: Menggunakan aplikasi atau perangkat lunak khusus untuk inventarisasi aset daerah yang dapat memperbarui data secara real-time.
- Pelatihan Pegawai: Melatih pegawai pemerintah daerah untuk mengoperasikan sistem digital tersebut guna memastikan data aset dikelola dengan baik dan mudah diakses.
- Penyempurnaan Database Aset: Membuat database terpusat yang mencakup semua jenis aset, termasuk tanah, gedung, kendaraan dinas, dan aset lainnya, dengan rincian lokasi, kondisi, nilai aset, dan dokumen legalitas.

#### **2. Percepatan Sertifikasi Tanah**

- Kolaborasi dengan BPN: Melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam percepatan proses sertifikasi tanah milik pemerintah daerah.
- Penyediaan Anggaran Khusus: Mengalokasikan dana yang memadai untuk menyelesaikan proses legalisasi aset tanah.

#### **3. Peningkatan Pengamanan Aset**

- Pengamanan Fisik: Memasang fasilitas keamanan seperti pagar, kamera pengawas (CCTV), dan sistem alarm pada gedung atau aset yang memiliki nilai strategis tinggi.
- Pusat Penyimpanan Dokumen: Mengelola dokumen penting seperti sertifikat tanah, BPKB, dan dokumen kendaraan lainnya dalam sistem penyimpanan yang terpusat dan berbasis digital.
- Penguatan Proses Administrasi: Menyusun kebijakan yang lebih ketat untuk memastikan dokumen administratif tidak tersebar di berbagai unit kerja.

#### **4. Implementasi Pemeliharaan Preventif**

- Jadwal Pemeliharaan Berkala: Menyusun jadwal pemeliharaan preventif yang terstruktur, termasuk inspeksi rutin dan perawatan berkala untuk semua jenis aset.
- Alokasi Anggaran Pemeliharaan: Menyediakan dana khusus untuk kegiatan pemeliharaan agar dapat dilakukan secara terencana dan konsisten.
- Monitoring Kondisi Aset: Menggunakan teknologi untuk memantau kondisi aset secara real-time, sehingga potensi kerusakan dapat dideteksi lebih awal.

#### **5. Penguatan Regulasi dan SDM**

- Evaluasi dan Pembaruan Kebijakan: Melakukan tinjauan ulang terhadap regulasi terkait pengelolaan BMD untuk memastikan kebijakan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan dan tantangan saat ini.
  - Peningkatan Kapasitas SDM: Mengadakan pelatihan teknis bagi pegawai pemerintah daerah dalam bidang inventarisasi, pengamanan, dan pemeliharaan aset untuk meningkatkan kompetensi mereka.
- 6. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan**
- Pemantauan Rutin: Melakukan monitoring secara berkala terhadap implementasi kebijakan dan praktik pengelolaan BMD untuk mengidentifikasi masalah sejak dini.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Alex S. Nitisemito, Marketing, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
2. Anton Dajan, Marketing Metode Statistik, Jilid II, Edisi revisi, LP3Fs, Jakarta, 1984.
3. Basu Swasta DH dan Irawan, manajemen pemasaran Modern, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1985
4. Marwan Asri, Marketing , BPFE, Yogyakarta, Edisi pertama , 1986
5. Philip kotler , Manajemen pemasaran , analisa perencanaan dan pengendalian , Jilid 2 , Edisi Kelima , 1990
6. Philip Kotler, dasar – dasar pemasaran , edisi ketiga , terjemahan intermedia , jakarta, 1987
7. Philip Kotler, Manajemen pemasaran, Analisis perencanaan dan pengendalian , Jilid I, Edisi Kelima , Erlangga , Jakarta, 1966
8. Radiosunu, manajemen pemasaran , suatu pendekatan analisis , edisi Kedua , BpFE , yogyakarta , 1986
9. Sudjana, Statistik untuk ekonomi dan manajemen , jilid II, Edisi baru , Tarsito Bandung, 1982.
10. Sumadi Suryabrata , Metodologi penelitian , CV. Rajawali , Jakarta , 1983.
11. William j. Standon, prinsip pemasaran , Erlangga , Jakarta,1985
12. Winardi, Harga dan penetapan harga dalam bidang pemasaran (Marketing). Edisi Revisi , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.